

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan riil per kapita yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Permasalahan yang seringkali dialami berbagai negara adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masalah kemiskinan menjadi salah satu persoalan mendasar bagi pemerintah. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan bukan menjadi masalah baru bagi Indonesia, melainkan topik utama dan telah menjadi fokus kebijakan sejak pemerintahan terdahulu. Meskipun masalah kemiskinan sudah ada sejak lama, namun tetap saja masalah tersebut belum mampu diatasi dengan baik.

Kemiskinan pada umumnya ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, lemahnya kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam kepemilikan serta kualitas faktor produksi yang memadai, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan. Masyarakat tersebut akan tertinggal jauh dengan masyarakat lainnya yang memiliki potensi lebih tinggi.

Menurut data Asian Development Bank (ADB)¹ menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia tahun 2014 berada pada peringkat lima dari delapan data negara ASEAN dengan persentase penduduk miskin sebesar 10,9 persen. Negara Myanmar berada di peringkat pertama dengan persentase penduduk miskin mencapai 25,6 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin Filipina sebesar 21,6 persen, Laos 23,2 persen, dan Kambodja 14,0 persen. Selain itu, negara dengan persentase penduduk miskin yang rendah adalah negara Thailand sebesar 10,5 persen, Vietnam 7 persen dan Malaysia 0,6 persen.

Selama tahun 2011-2014 jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin mencapai 29,89 juta orang. Sementara, pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin mencapai 27,73 juta orang, terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 2,16 juta orang. Namun, pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 0,78 juta orang. Meningkatnya kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015 disebabkan karena meningkatnya harga komoditas beras dan terjadi gejolak perekonomian global pada tahun tersebut².

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2015

Periode	Jumlah penduduk miskin (juta orang)
2011	29,89
2012	28,59
2013	28,55
2014	27,73
2015	28,51

Sumber : BPS

¹Asian Development Bank, *Kemiskinan di Indonesia* (<https://www.adb.org/id/Indonesia/poverty/> diakses pada tanggal 20 April 2017)

²Liliy Rusna, *Angka Kemiskinan Meningkat Tembus 28.51 Juta Orang* (http://ekbis.sindo news.com_ diakses pada tanggal 20 Juli 2017)

Kemiskinan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu meningkatnya tindakan kriminalitas. Kemiskinan digambarkan dengan banyaknya masyarakat yang menganggur, sehingga mereka tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sulitnya mencari penghasilan dan dorongan terhadap permintaan kebutuhan yang harus dipenuhi menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminalitas. Penelitian yang dilakukan oleh Rusmani menyatakan bahwa angka kemiskinan yang tinggi menimbulkan peningkatan pula terhadap angka kriminalitas³. Mengingat dampak negatif yang timbul dari kemiskinan, maka masalah kemiskinan harus segera diatasi.

Menurut Badan Pusat Statistik⁴, pulau Jawa masih menjadi penyumbang penduduk miskin terbesar, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 15,55 juta orang. Pada tahun 2011, jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, tahun 2012-2015 provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi berada di provinsi Jawa Timur, urutan kedua di provinsi Jawa Tengah dan urutan ketiga berada di provinsi Jawa Barat.

Menurut Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) provinsi Jawa Tengah memiliki potensi lebih tinggi dibandingkan provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur terutama destinasi wisata⁵. Badan Kordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI), meyakini bahwa Jawa Tengah memiliki potensi untuk menarik para investor, salah satunya adalah potensi jumlah

³Rusnani, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Di Kabupaten Sumenep", *Jurnal Performance Bisnis Dan Akuntansi*, Vol.V, No 1, Maret 2015

⁴Fully Syafi, *Orang Miskin Jawa Timur terbanyak di Indonesia* (<https://m.tempo.co/read/news/2014/01/03/173541819/orang-miskin-jawa-timur-terbanyak-di-indonesia>_ diakses pada tanggal 20 April 2017)

⁵Budi Aris, *Indef sebut Jateng Belum Mampu Mengoptimalkan Potensi Daerahnya* (<https://www.radioidola.com/indef-sebut-jateng-belum-mampu-mengoptimalkan-potensi-daerahnya/>_Diakses pada tanggal 20 November 2017)

penduduk yang banyak dan sebagian besar berusia produktif.⁶ Namun, potensi yang dimiliki belum mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal ini terbukti melalui data di bawah ini yang menggambarkan bahwa provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2011-2015

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Banten	690,90	642,90	677,50	649,19	702,40
DKI Jakarta	355,20	366,3	371,7	393,98	398,92
Jawa Barat	4650,9	4421,5	4375,2	4239,0	4435,7
Jawa Tengah	5256	4863,5	4811,3	4561,8	4577,04
DI Yogyakarta	564,30	565,32	562,10	541,90	550,23
Jawa Timur	5251,45	4992,75	4893,01	4748,40	4789,12

Sumber : BPS Prov Jateng

Tahun 2011 jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah mencapai 5256 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2014 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 4561 ribu jiwa. Sementara itu, tahun 2015 jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah bertambah. Tahun 2015 kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 4577 ribu jiwa, terdapat penambahan sebesar 16 ribu jiwa. Kepala Bidang Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menyatakan bahwa kenaikan jumlah penduduk miskin disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk dan menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga sejumlah komoditas⁷.

⁶Anggara Pernando, *BKPM Ingatkan Potensi Besar yang Dimiliki Jawa Tengah* (<http://semarang.bisnis.com/read/20171124/12/97031/bkpm-ingatkan-potensi-besar-yang-dimiliki-jawa-tengah> _diakses pada tanggal 20 November 2017)

⁷Aris Wasita, *Jumlah Penduduk Miskin Jawa Tengah Naik* (<http://www.antaranews.com/berita/518217/jumlah-penduduk-miskin-jawa-tengah-naik> _diakses pada tanggal 17 Juli 2017)

Kemiskinan di provinsi Jawa Tengah telah menjadi fokus kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah menyampaikan sembilan masalah yang telah dipetakan, yaitu belum berdaulatnya pangan terutama untuk komoditas kedelai, rendahnya kualitas produk garam, belum meratanya pelayanan energi listrik untuk masyarakat, dan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran⁸. Selain itu empat masalah lainnya yaitu rendahnya derajat kesehatan masyarakat, kinerja penyelenggaraan pendidikan yang belum memuaskan, industri pariwisata yang belum siap bersaing, masih banyaknya aset yang belum dimaksimalkan, dan infrastruktur yang tidak sepenuhnya didukung oleh sektor lain. Dari kesembilan masalah, empat di antaranya menjadi prioritas utama untuk ditangani yakni, ketahanan pangan, ketahanan energi, penanggulangan kemiskinan dan masalah pengangguran.

Kemiskinan timbul akibat dari minimnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Upah digunakan sebagai alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan baik berupa barang maupun jasa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vinny Alvionita Riva, Hainim Kadir, dan Deny Setiawan menunjukkan hasil bahwa variabel upah minimum provinsi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan⁹. Upah di provinsi Jawa Tengah paling rendah jika dibandingkan upah provinsi lainnya, di pulau Jawa. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2014 menyatakan bahwa Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Jawa Tengah paling tinggi hanya sebesar Rp 1,38 juta.

⁸Agustinus Purba, *Musrenbangwil Jateng : bappeda petakan 9 masalah untuk segera diatasi* (<http://beritadaerah.co.id/2016/04/01/musrenbangwil-jateng-bappeda-petakan-9-masalahuntuk-segera-diatasi/> diakses pada tanggal 12 Februari 2017)

⁹Vinny Alvionita Riva, Hainim Kadir, dan Deny Setiawan, "Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau", *Jurnal Online Mahasiswa Ekonomi*, Vol 1 No 2, Oktober 2014

Angka tersebut relatif lebih kecil dibandingkan nilai UMK tertinggi di seluruh provinsi Jawa lainnya.¹⁰

Pemerintah mengambil kebijakan penentuan upah minimum yang bertujuan agar pendapatan yang diterima oleh masyarakat dapat memenuhi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi salah satu faktor yang menentukan besarnya upah. Indeks Harga Konsumen (IHK) mengukur harga pada sekumpulan barang tertentu seperti bahan makanan pokok, perumahan, pakaian, serta barang dan jasa lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Upah yang menggambarkan daya beli dari pendapatan yang diterima oleh masyarakat merupakan upah riil. Upah riil artinya kemampuan upah tersebut untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup.

Tabel 1.3
Upah Riil Provinsi Jawa Tengah

Wilayah Jawa Tengah	Upah Riil (Rupiah)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Upah Riil	532.502	578.975	581.721	767.284	902.823

Sumber : BPS Prov Jateng

Tabel di atas, menggambarkan upah riil provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2011 upah riil provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 532.502,00. Tahun 2012 meningkat sebesar Rp 46.473,00. Tahun 2013 meningkat kembali sebesar Rp 2.746,00 jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya. Tahun 2014 upah riil provinsi Jawa Tengah meningkat sebesar Rp 185.563,00

¹⁰ Galih Gumelar, *Upah Rendah, Jawa Tengah Diincar Perusahaan Padat Karya*, (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150616090357-78-60229/upah-rendah-jawa-tengah-diincar-perusahaan-padat-karya/> _diakses pada tanggal 20 November 2017)

menjadi Rp 767.284,00. Tahun 2015 upah riil provinsi Jawa Tengah meningkat sebesar Rp 135.539,00 menjadi Rp 902.823,00.

Selain itu, penyebab timbulnya kemiskinan adalah kurangnya modal yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat tidak mampu untuk mengelola dan membangun daerahnya. Selama ini, keberlangsungan pengelolaan daerah masih bergantung pada besarnya anggaran yang diberikan pemerintah. Untuk itu, pembelanjaan anggaran yang dilakukan harus mampu memberdayakan potensi yang dimiliki daerah tersebut sehingga dapat memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya. Keterkaitan pengaruh besarnya anggaran yang dibelanjakan terhadap kemiskinan daerah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sampurna Budi Utama dan Nur Aisyah Kustiani. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa anggaran belanja pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan¹¹.

Pemerintah berupaya membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan melalui dana sosial yang bersumber dari anggaran belanja pemerintah daerah. Dana bantuan sosial merupakan dana yang termasuk dalam anggaran belanja tidak langsung yang berfungsi untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat dari masalah-masalah sosial yang ada di lingkungannya, salah satunya adalah kemiskinan.

¹¹Sampurna Budi Utama dan Nur Aisyah Kustiani, "Analisis Pengaruh Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Fungsi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Era Desentralisasi Fiskal", *Jurnal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2012

Tabel 1.4
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

Belanja Bantuan Sosial (Ribu rupiah)					
Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Jawa Tengah	938.959.410	407.403.028	382.132.197	357.720.547	423.489.871

Sumber : Keuangan APBD

Data tersebut menggambarkan realisasi belanja pemerintah yaitu belanja bantuan sosial mengalami peningkatan sejak tahun 2012. Tahun 2011 jumlah realisasi belanja sosial mencapai Rp 938.959.410.000,00. Sementara itu, pada tahun 2012 realisasi anggaran mengalami penurunan. Tahun 2013 dan 2014 realisasi anggaran kembali menurun menjadi Rp382.132.197.000,00 dan Rp 357.720.547.000,00. Tahun 2015 realisasi anggaran belanja bantuan sosial meningkat Rp 423.489.871.000,00. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja bantuan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi dan menekan angka kemiskinan yang tinggi.

Kemiskinan juga disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat yang berpendidikan rendah kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian yang dilakukan oleh I Made Tony Wirawan dan Sudarsana Arka menemukan bahwa pendidikan, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran secara serempak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin¹².

¹² I Made Tony Wirawan dan Sudarsana Arka, "Analisis pengaruh pendidikan, PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Bali", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol 4, No. 5, Mei 2015

Pendidikan menjadi salah satu aspek penting yang menentukan kemajuan suatu bangsa. Untuk itu, pemerintah Indonesia berupaya dalam mendukung masyarakat agar memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yaitu melalui program wajib belajar 9 tahun, yang terdiri dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Tahun 2015, program wajib belajar 9 tahun mulai ditingkatkan menjadi program wajib belajar 12 tahun yang terdiri dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat. Namun, program wajib belajar 12 tahun ini belum direalisasikan di seluruh wilayah Indonesia dikarenakan belum meratanya infrastruktur pendidikan untuk membuka sekolah menengah atas atau sederajat¹³.

Hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami masalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan di wilayah tersebut. Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang tingkat pendidikan masyarakatnya rendah. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini menempuh pendidikan kurang dari delapan tahun. Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko mengatakan kondisi tersebut sangat memprihatinkan sekitar 60% tenaga kerja di Jawa Tengah saat ini masih lulusan Sekolah Dasar (SD)¹⁴. Artinya pertumbuhan jumlah orang-orang terdidik masih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang-orang yang belum cukup terdidik.

¹³Ester Lince, *Pemerintah Daerah Harus Perkuat Wajib Belajar 12 Tahun* (http://edukasi.kompas.com/read/2012/08/17/08542212/Pemerintah.Dearah.Harus.Perkuat.Wajib.Belajar.12.Tahun_ diakses pada tanggal 9 Maret 2015)

¹⁴ Lingga Sukatma Wiangga, *Tingkat Pendidikan Rendah, Pemprov Jateng Pacu Budaya Literasi* (http://kabar24.bisnis.com/read/20170508/78/651995/tingkat-pendidikan-rendah-pemprov-jateng-pacu-budaya-literasi_diakses pada tanggal 20 November 2017)

Tabel 1.5
Data Tingkat Pendidikan di Jawa Tengah

Wilayah Jateng	Rata-rata Lama Sekolah				
	2011	2012	2013	2014	2015
PROVINSI JAWA TENGAH	6.74	6.77	6.8	6.93	7,03

Sumber : BPS Prov Jateng

Data tersebut menggambarkan bahwa penduduk Jawa Tengah tingkat pendidikannya masih rendah. Hal tersebut digambarkan dengan rata-rata lama sekolah provinsi Jawa Tengah selama 6 tahun, artinya masyarakat Jawa Tengah hanya lulusan Sekolah Dasar. Jenjang pendidikan yang mereka tempuh masih dalam tahap dasar. Kemampuan membaca, menulis, dan perhitungan dasar yang mereka miliki.

Mengurangi jumlah kemiskinan dapat membantu mempercepat proses pembangunan ekonomi nasional. Mengingat provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi sehingga menjadi penyumbang besarnya jumlah kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, upaya pemerintah baik nasional maupun daerah diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tingginya tingkat kemiskinan, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kenaikan harga bahan makanan pokok yang tidak diikuti dengan kenaikan upah akan menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan.

2. Meningkatnya jumlah pengangguran menggambarkan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pendapatan guna memenuhi kebutuhan.
3. Rendahnya upah yang diperoleh masyarakat sehingga masyarakat tidak mampu untuk membeli barang/jasa yang dibutuhkan.
4. Rendahnya realisasi bantuan sosial dari pemerintah menyebabkan sulitnya masyarakat untuk keluar dari kemiskinan karena keterbatasan modal.
5. Rendahnya tingkat pendidikan akan mempersulit masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk itu, perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian hanya fokus ke dalam permasalahan yang akan diteliti. Maka, penelitian ini dibatasi hanya pada masalah upah, bantuan sosial dan tingkat pendidikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat pengaruh antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh upah terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah?

2. Apakah terdapat pengaruh bantuan sosial terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah terdapat pengaruh upah, bantuan sosial dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengetahuan mengenai hal-hal yang mempengaruhi meningkatnya jumlah kemiskinan. Dalam penelitian ini, membahas tiga faktor yang mempengaruhi jumlah kemiskinan yaitu upah, bantuan sosial, dan tingkat pendidikan di daerah penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, khususnya di provinsi Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan solusi terhadap masalah kemiskinan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut.